

**PEMERINTAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2023**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Kol H. Nazom Nurhawi Depan SMK N 3 Model Sekayu
Fax / Telp. 0714 – 3330033

Website : <http://www.kesbangpol.mubakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 076 /KPTS-KESBANGPOL/2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja pemerintah Daerah dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Panyusunan rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2020, sehingga dipandang perlu menetapkan rencana kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tk.II dan Kotap(LNRI Tahun 1956 Nomor 55), Undang – undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang – undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (LNRI Tahun 1956 Nomor 57) tentang pembentkan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai undang-undang (LNRI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan LNRI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LNRI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan LNRI Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005- 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;
19. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/III/Bappeda/SE/II/2022 tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023.**
- KESATU :** Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.
- KEDUA :** Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program dan Kegiatan kurun waktu satu tahunan yaitu tahun 2023.
- KETIGA :** Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT :** Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang disebut Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

- KELIMA : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2017-2022 yang dituangkan dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- KEENAM : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengevaluasi capaian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 18 Juli 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



JONNI MARTOHONAN, AP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19731109 199311 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dapat menyelesaikan Laporan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target maupun realisasinya.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA ini masih banyak kekurangan baik dari substansi maupun format penulisan, oleh karena itu Kritik dan Saran yang Konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih baik saran maupun pikiran dalam penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Sekayu, 18 Juli 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



JONNI MARTOHONAN, AP.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19731109 199311 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah tahun lalu	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	27
2.5 Penelaahan Usulan program dan kegiatan Masyarakat.....	37
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	41
3.3 Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	55
BAB V PENUTUP.....	64

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat antara lain program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif serta prakiraan maju. Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 secara garis besar memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Sebagai sebuah dokumen resmi, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023, serta digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rencana kerja, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rencana kerja dan tahap penetapan renja perangkat daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 tentang susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

1.2. Landasan Hukum

Dasar - dasar hukum yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tersebut, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 No. 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1312) ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017- 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
15. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 271 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin;
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

17. Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/III/Bappeda/SE/II/2022 tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud** penyusunan renja adalah mengefektifkan proses pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam perencanaan kinerja tahunan atau terarahnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan atau tercapainya tujuan pelayanan publik.
- b. **Tujuan** dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin ini adalah Memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dari Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, adalah sebagai berikut :

BAB. I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB. II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan capaian renstra Perangkat Daerah Tahun lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB. III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Program dan Kegiatan

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB. V. PENUTUP

BAB. II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin pada Tahun 2023 ditentukan dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Renja tahun bersangkutan dan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022.

Dengan menggunakan format Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2022 sampai dengan triwulan kedua pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, diperoleh hasil Capaian Kinerja sebesar 23,90 %.

Bila melihat persentase Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tersebut diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajiban Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Banyuasin pada Triwulan kedua Tahun 2022 belum memenuhi target.

Adapun faktor - faktor penyebab tidak terpenuhinya target kinerja program / kegiatan adalah karena adanya rasionalisasi kegiatan sebesar 30% dan masih adanya penguncian-penguncian anggaran sehingga menyebabkan terhambat dan tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang telah direncanakan.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin s/d Triwulan kedua tahun 2022 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 (terlampir).

Tabel. 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan kedua Tahun 2022
Kabupaten Musi Banyuasin**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
8	01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
8	01 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran								
8	01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD								
8	01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Laporan	3	3 Laporan	3	100%	3 Laporan	9	50%
8	01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	2	2 Laporan	2	100%	6 Laporan	10	83%
8	01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	126 Orang	35	36 Orang	36	100%	34 Orang	105	83%
8 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah								
8 01 01 2.03 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dok	4	4 Dok	4	100%	0 Dok	8	67%
8 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD								
8 01 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	68 Paket/Stel	0	0 stel	0	#DIV/0!	0 Stel	0	0%
8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	9 Orang	0	3 orang	1	33%	0 Orang	1	11%
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran								
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	46 paket	14	16 Paket	16	100%	16 Paket	46	100%
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	4	6 Paket	6	100%	7 Paket	17	106%
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	82 Palet	30	28 Paket	28	100%	24 Paket	82	100%
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	162 Paket	53	52 Paket	52	100%	57 Paket	162	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	27 Jenis	8	8 Jenis	8	100%	11 Jenis	27	100%
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	16490 Examp	8740	74504 Examp	74,504	100%	43100 Examp	194,204	100%
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	30 Kali	10	10 Kali	10	100%	10 Kali	30	100%
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	12	12 Laporan	12	100%	12 Laporan	36	100%
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Kesbangpol								
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket	0	4 Paket	4	100%	0 Paket	4	50%
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor								
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	12	12 Laporan	12	100%	6 Laporan	30	83%
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	12	12 Laporan	12	100%	6 Laporan	30	83%

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	4	4 unit	4	100%	4 Unit	12	100%
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	1	1 unit	1	100%	0 unit	2	100%
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	10	18 unit	18	100%	0 Unit	28	93%
8	01	2			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa								
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa								
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran	1075 Orang	285	500 Orang	257	51%	150 Orang	692	64%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
	Sejarah Kebangsaan	Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan										
8	01	02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang	100	200 Orang	200	100%	0 Orang	300	60%
					280 Orang	100	165 Orang FPK	100	61%	0 Orang FPK	200	71%
					5 Laporan GNRM	1	3 Laporan GNRM	1	33%	0 Laporan GNRM	2	40%
8	01	02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	45 Kecamatan	15	15 Kec	15	100%	1 Kec	31	69%
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARGA DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								
8 01 03 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	12 Dok	0	0 Dok	0	#DIV/0!	0 Dok	0	0%
8 01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	1 KPU	0	1 KPU	0	0%	0 KPU	0	0%
			33 Parpol	11	11 Parpol	11	100%	0 Parpol	22	67%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan			
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)		
	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Polri	0	1 Polri	1	100%	0 Polri	1	100%		
8	01	03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	22 Parpol	11	11 Parpol	11	100%	0 Parpol	22	100%
					14 Lokasi	3	3 Lokasi	0	0%	8 Lokasi	14	100%
8	01	03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	45 Kec	15	15 Kec	15	100%	6 Kec	36	80%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
8 01 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina								
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan								
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	39 Ormas	10	10 Ormas	9	90%	6 Orang	25	64%
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021 (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2022 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan						
					Target Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja PD Tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2022 (n-1)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)					
8	01	05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	6	Kec	2	2	Kec	2	100%	0	Kec	4	67%
					6	Lokasi	2	2	Lokasi	2	100%	0	Lokasi	4	67%
					20	Kec	3	15	Kec	15	100%	0	Kec	18	90%
8	01	6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial											
8	01	06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial											
8	01	06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan	175	Orang	0	0	Orang	0	#DIV/0!	0	Orang	0	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan pada target renstra pada periode tahun anggaran 2022, Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin memiliki 3 (tiga) indikator sasaran RPJMD yang meliputi :

1. Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti
2. Persentase keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin
3. Cakupan bina ormas

Pencapaian kinerja pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan bahwa untuk masing - masing indikator kinerja, realisasi pencapaian kinerja pada Triwulan kedua tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota angka capaian menunjukkan 28,11 % ;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan angka capaian menunjukkan 17,78 % ;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik angka capaian menunjukkan 35,00 % ;
4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan angka capaian menunjukkan 50,00 % ;
5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya angka capaian menunjukkan 0,00 % ;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial angka capaian menunjukkan 25,00 %.

Keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat dari pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini :

Tabel. 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				n-2 (2021)	n-1 (2022)	n (2023)	n+1 (2024)	n-2 (2021)	n-1 (2022)	n (2023)	n+1 (2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti	-	-	90%	100%	NA	NA	125%	0%	NA	NA	Untuk capain n-1 (2022) sedang dalam proses pelaksanaan
2.	Persentase keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	75%	75%	NA	NA	109%	109%	NA	NA	Untuk capain n-1 (2022) sama dengan tahun sebelumnya yaitu tahun terakhir pelaksanaan pemilu
3.	Cakupan Bina Ormas	-	-	90%	100%	NA	NA	133%	50%	NA	NA	Untuk capain n-1 (2022) sedang dalam proses pelaksanaan

Catatan:

Matrik ini digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja pelayanan SKPD Berdasarkan Renstra Kesbangpol 2022 Indikator Kinerja Utama Kesbangpol sebanyak 4 indikator kemudian setelah hasil evaluasi dan rekomendasi dari Inspektorat berubah menjadi 3 indikator.

Tabel. 2.2.1
Proyeksi Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target SPM/standar nasional	Target IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				n-2 (2021)	n-1 (2022)	n (2023)	n+1 (2024)	n-2 (2021)	n-1 (2022)	n (2023)	n+1 (2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Penurunan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin	-	-	NA	NA	90%	80%	NA	NA	0%	0%	Untuk capaian n (2023) sedang dalam proses perencanaan

Catatan:

Untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berbeda dengan Indikator Kinerja Utama Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2017-2022

Secara umum, kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2021 - 2022 semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh keberhasilan capaian indikator setiap tahunnya. Adapun untuk realisasi capaian indikator kinerja utamanya sebagai berikut, pada tahun 2021 Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti dengan capaian indikator 125%, indikator Persentase keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin capaian indikator 109% dan Indikator Cakupan Bina Ormas capaian indikator 90%. Sedangkan realisasi capaian indikator kinerja utama untuk tahun 2022 sampai dengan Triwulan ke dua, Persentase potensi konflik yang ditindaklanjuti dengan capaian indikator 0%, indikator Persentase keikutsertaan penduduk dalam pemilu dan pemilukada di Kabupaten Musi Banyuasin capaian indikator 109% dan Indikator Cakupan Bina Ormas capaian indikator 50%.

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Isu – isu Strategis Internal

- a. Keterbatasan dana yang berakibat kegiatan Kesbangpol tidak Optimal;
- b. Kuantitas SDM yang masih belum mencukupi serta kualitas SDM yang perlu ditingkatkan;
- c. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai.

2. Isu – isu Strategis Eksternal

Isu strategis di Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagai berikut:

- a. Lunturnya pemahaman nilai – nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika khususnya dikalangan pelajar dan pemuda di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. Kurangnya kesadaran bela negara dan rasa cinta tanah air ditengah – tengah masyarakat bagi kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian dan pengamalan nilai – nilai dan etika budaya bangsa;
- d. Masih minimnya fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan dikalangan pemuda dan pelajar;

- e. Belum optimalnya peran Forum Pemabuaran Kebangsaan (FPK) di tingkat Kabupaten maupun Kecamatan;
- f. Masih kurangnya koordinasi antar stakeholder dalam peningkatan wawasan kebangsaan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Dalam mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, maka strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
2. Meningkatkan Kewaspadaan Nasional di Daerah
3. Meningkatkan Ketahanan Politik Dalam Negeri
4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

Untuk mewujudkan strategi dan sasaran tersebut maka diambilah Kebijakan sebagai berikut :

1. Pembumih Nilai Nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
2. Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan
3. Pembangunan Karakter Bangsa
4. Pembinaan Kewaspadaan Dini
5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Konflik
6. Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
7. Fasilitasi Lembaga Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik
8. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Stabilitas Daerah
9. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama
10. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Daerah
11. Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Beberapa aspek yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mempengaruhi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara lain :

A. Lingkungan Internal

1. Kekuatan (Strength) Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melaksanakan kegiatan baik pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, antara lain :

- a) Adanya Peraturan Perundang-undangan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai landasan yang kuat dimana dengan adanya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya, serta didukung juga Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang memberikan rambu-rambu dan koridor yang harus dilalui untuk sampai kepada tahap perwujudan visi dan misi yang telah diamanatkan;
- b) Tersedianya sumber daya manusia secara kuantitas yang memadai, bahwa didalam menjalankan roda pemerintahan tentunya didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, dan berkemampuan profesional didalam menjalankan tugasnya;
- c) Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung, bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, merupakan suatu modal yang sangat mendukung bagi pelaksanaan pencapaian tujuan;
- d) Adanya dukungan dana untuk membantu kegiatan yang berasal dari APBD;

2. Kelemahan (Weakness)

- a) Secara keseluruhan kualitas Sumber Daya Manusia masih belum memenuhi standar dan secara kuantitas jumlah PNS yang memenuhi syarat masih belum mencukupi dan perlunya peningkatan kualitas untuk mendukung kegiatan;
- b) Kualitas pelayanan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin secara umum masih belum memenuhi rasa kepuasan publik sehingga dengan demikian masih menjadikan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan umum;
- c) Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas bagi tiap bidang;
- d) Masih kurangnya pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- e) Tingkat kesejahteraan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang masih kurang sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kegiatannya dalam melaksanakan tugas;
- f) Infrastruktur berupa sarana dan prasarana masih kurang mendukung dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

B. Lingkungan Eksternal

1. Peluang (Opportunity)

- a) Kondisi stabilitas keamanan yang kondusif di Kabupaten Musi Banyuasin;
- b) Adanya dukungan dan kerjasama dari organisasi masyarakat dan lembaga nirlaba lainnya baik itu bersifat kegiatan, masukan, kritikan bahkan pengawasan untuk kemajuan pelaksanaan kegiatan;
- c) Makin meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, baik itu yang bersifat partisipasi swadaya masyarakat maupun keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan;
- d) Meningkatnya wawasan kebangsaan dan berpolitik masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Ancaman (Threat)

- a) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin masih belum pulih sepenuhnya sehingga perlu membangun rasa kepercayaan tersebut;
- b) Konflik perbatasan, sengketa lahan dengan pihak investor yang masih terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin;
- c) Lunturnya nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat;
- d) Hilangnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat;
- e) Meningkatnya demo-demo anarkis serta ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Pemerintah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap RKPD dimaksud untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Berdasarkan rancangan awal yang telah disusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Badan. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana

capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin. Selengkapnya revidi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah disajikan pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023
Kabupaten Mus Banyuasin

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Rancangan Awal RKPD (2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(5)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100%	8.642.733.500	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100%	6,845,608,436	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	50.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	63,775,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	38,935,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Lap	24,840,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD	100%	5.300.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD	100%	4,762,604,826	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Org/Bln	5.300.00.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kesbangpol	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37 Org/Bln	4,762,604,826	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	35.180.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	28,136,000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dok	35.180.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dok	28,136,000	

No	Rancangan Awal RKPD (2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100%	155.790.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	100%	91,625,000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kesbangpol	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	75.790.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kesbangpol	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	41,625,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kesbangpol	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	80.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kesbangpol	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	8 Orang	50,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	719.875.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	876,409,060	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	29.875.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 Paket	25,007,190	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	157,876,000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	31 Paket	30.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesbangpol	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	31 Paket	47,822,270	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59 Paket	160.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kesbangpol	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	59 Paket	160,182,800	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesbangpol	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	49,999,800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	30,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kesbangpol	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dok	30,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kesbangpol	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	14 Laporan	15.000.000	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kesbangpol	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	14 Laporan	20,804,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	355.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	384,717,000	

No	Rancangan Awal RKPD (2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Kesbangpol	100%	1.315.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Kesbangpol	100%	183,351,500	
	Pengadaan Mebel	Kesbangpol	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit	150.000.000	Pengadaan Mebel	Kesbangpol	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	62 Unit	183,351,500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor	100%	638.498.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor	100%	401,504,300	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	131.298.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	132,904,300	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	507.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kesbangpol	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	268,600,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	428.390.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	438,202,750	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	180.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kesbangpol	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	226,011,750	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199,991,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	22.390.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kesbangpol	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	12,200,000	
2.	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	100%	750.000.000	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	100%	254,997,000	

No	Rancangan Awal RKPD (2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	750.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	100%	254,997,000	
	Pelaksanaan Kebijakandi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	800 Orang	500.000.000	Pelaksanaan Kebijakandi Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	215 Orang	188,312,000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba -	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	210 Orang	205.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba -	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	70 Orang	46,752,000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	45.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	4 Laporan	19,933,000	
3.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	8 Dok	4.580.170.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	8 Dok	8,342,811,000	

No	Rancangan Awal RKPD (2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	4.580.170.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	8,342,811,000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	-	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1 Dokumen	6,695,170,000	
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200 Orang	3.195.170.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	975 Orang	595,845,000	

No	Rancangan Awal RKPD (2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1200 Orang	750.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	40 Orang	88,736,000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	365 Laporan	635.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	365 Laporan	963,060,000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	100%	300.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	100%	102,589,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	300.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	102,589,000	

No	Rancangan Awal RKPD (2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	300 Orang	300.000.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang	102,589,000	
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	450.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	255,891,000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	450.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	255,891,000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250 Orang	450.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	125 Orang	255,891,000	
6.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	100%	780.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	100%	572.383.176	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	780.000.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	572.383.176	

No	Rancangan Awal RKPD (2023)					Hasil Analisis Kebutuhan (2023)					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	165.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	200 Orang	125,499,948	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	200.000.000	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	50 Orang	181,899,974	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	250.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Muba	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 Laporan	227,983,239	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	165.000.000	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Muba	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen	37,000,015	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat.

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahunan yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin.

Akan tetapi untuk tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak mempunyai usulan program dan kegiatan dari masyarakat atau para pemangku kepentingan.

Tabel. 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-

BAB. III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

➤ RPJMN

Penyusunan Renja Kesbangpol Tahun 2023 mengacu pada Dokren Kesbangpol 2023-2026 dan RPJMD dimana dokumen tersebut harus memperhatikan kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang ada di RPJMN dengan disesuaikan kondisi dan kebutuhan daerah. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan standar pelayanan minimal dan indikator kinerja utama yang perlu direncanakan dan dilaksanakan pertahunnya.

➤ Rencana Kerja Pemerintah

Renja yang disusun setiap tahunnya harus selaras dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan yang ada di RKPD dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah. Dalam penyusunan Renja-PD Tahun 2023 wajib mempodamani RPJMN Tahun 2020-2024, Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023, RPJPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025 dan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/188/TAPD/SE/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026. RKPD 2023 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 Sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi Pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 - 2025 : “MUBA Maju, Mandiri dan Sejahtera 2025” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005 – 2025. Mengingat Renja 2023 ini disusun pada masa transisi dimana bupati terpilih periode 2017-2022 telah berakhir masa jabatannya dan sehubungan dengan akan dilaksanakannya pilkada serentak tahun 2024 maka akan ada kekosongan kekuasaan jabatan bupati di Kabupaten Musi Banyuasin. Selama menunggu terpilihnya bupati definitif 2024 maka dalam penyusunan renja ini hanya menetapkan tujuan dan sasaran tidak ada visi dan misi. Renja 2023 disusun secara teknokrat dimana arah kebijakan pembangunan lebih difokuskan kepada isu-isu terkini dan tetap melanjutkan program-program yang belum terealisasi pada periode sebelumnya.

Adapun tujuan dan Sasaran Pembanguna tahun 2023-2026 adalah sebagaimana tabel dibawah ini :

TUJUAN	SASARAN
1. Menguatkan Ekonomi Daerah Untuk mendorong Transformasi Ekonomi	2. Meningkatnya daya beli dan menurunnya ketimpangan pendapatan masyarakat 3. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka 4. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan 5. Meningkatnya nilai tukar petani 6. Meningkatnya kontribusi usaha mikro, IKM dan Industri Pengolahan pada perekonomian daerah 7. Meningkatnya kondisi jalan mantap 8. Meningkatnya pelayanan air bersih 9. Meningkatnya pelayanan sanitasi 10. Menurunnya Kawasan permukiman kumuh 11. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik	11. Meningkatnya angka harapan hidup 12. Meningkatnya indeks Pendidikan 13. Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan

Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor 050/III/BAPPEDA/SE/II/2022 tentang Arah Kebijakan Pembangunan dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, maka diarahkan pada “Meningkatkan Produktivitas dan Hilirisasi Komoditas Unggulan yang Berkelanjutan”. Arah pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin 2023-2026 juga tetap mempertimbangkan hal-hal dibawah ini :

1. Mempertimbangkan penanganan akibat pandemic covid-19 yang berdampak luas pada kondisi ekonomi, social dan Kesehatan masyarakat.

2. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Bupati Musi Banyuasin, pokok-pokok pikiran DPRD, Program unggulan daerah dan usulan dari masyarakat.
3. Rencana program/kegiatan/subkegiatan berikut pengalokasian pagu indikatif disusun berbasis kinerja dan money follow programme priority, output dan putcome yang jelas dan terukur, terpadu lintas sectoral serta melakukan upaya terobosan baru yang efektif untuk pencapaian target indikator sasaran, penyelesaian permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan termasuk implementasi program prioritas serta disusun dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
4. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif diantaranya peningkatan peran swasta melalui kegiatan tanggungjawab social dan lingkungan perusahaan/TJSLP (Corporate social Responsibility/CSR) dan Kerjasama dengan Lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/sedekah/infaq dalam kegiatan pembangunan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin merupakan tujuan dan sasaran Dokumen Perencanaan 2023 - 2026 yaitu **“Terpeliharanya Kesatuan Bangsa, Stabilitas Politik dan Demokrasi diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin”**. Tujuan ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang tercantum dalam Surat Edaran Bupati Musi Banyuasin Nomor : 050/188/TAPD/SE/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pemetaan Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 dimana salah satu tujuan pembangunan 2023-2026 adalah **Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**. Pembangunan dan roda pemerintahan akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh kondisifitas dan stabilitas daerah yang baik, aman dan tentram jauh dari pertikaian atau

konflik, huru-hara atau masuknya paham-paham radikal maupun aliran keagamaan yang menyesatkan. Sehingga Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu **“Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin”**.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun 2023
1	2	3	4
Terpeliharanya kesatuan bangsa, stabilitas Politik dan Demokrasi di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin	Meningkatnya Pengelolaan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin	Persentase Penurunan Potensi Konflik SARA di Kabupaten Musi Banyuasin	90%

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Program dimaksud merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu serta untuk mencapai visi dan misi Bupati Musi Banyuasin, adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang dihadapi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2023 mempunyai 6 (enam) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) subkegiatan.. Adapun Kelompok sasaran untuk menunjang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda
2. Kalangan pelajar, guru dan pendidik

3. Unsur - unsur aparaturnya Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
4. Pimpinan, kepengurusan dan simpatisan parpol di tingkat kabupaten dan kecamatan
5. Pengurus organisasi kemasyarakatan Ormas, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dan Organisasi kepemudaan.

Lokasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berlokasi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan dilaksanakan juga di kecamatan – kecamatan ataupun desa-desa yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin. Sumber dana yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin.

Adapun program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin yang direncanakan untuk periode Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Musi Banyuasin

Nama OPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				16,374,279,612				13,971,532,000
8 01 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran		100%	6,845,608,436				8,497,362,000
8 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD		100%	63,775,000				51,000,000
8 01 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	4 Dokumen	38,935,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	25,500,000
8 01 01 2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	4 Laporan	24,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	25,500,000
8 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD		100%	4,762,604,826				5,500,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	37 Orang/bulan	4,762,604,826	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	5,500,000,000
8	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Adminitrasi Barang Milik Daerah			28,136,000				50,000,000
8	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	4 Dokumen	28,136,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	50,000,000
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD		100%	91,625,000				105,000,000
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	2 Paket	41,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	50,000,000
8	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	8 Orang	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	55,000,000
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	876,409,060				738,000,000
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	18 Paket	25,007,190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	30,000,000
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	10 Paket	157,876,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	50,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	31 Paket	47,822,270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	32,000,000
8	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	59 Paket	160,182,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	165,000,000
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	10 Paket	49,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	52,500,000
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	2 Dokumen	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	31,500,000
8	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	14 Laporan	20,804,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	17,000,000
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	100 Laporan	384,717,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	360,000,000
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Kesbangpol		100%	183,351,500				666,500,000
8	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	62 Unit	183,351,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	150,000,000
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor		100%	401,504,300				647,862,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	12 Laporan	132,904,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	137,862,000
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	12 Laporan	268,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	510,000,000
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	438,202,750				739,000,000
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	4 Unit	226,011,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	185,000,000
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	1 Unit	199,991,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	500,000,000
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	20 Unit	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	24,000,000
8	01	2			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa		100%	254,997,000				787,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pesentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa		100%	254,997,000			787,500,000	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	215 Orang	188,312,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	525,000,000
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Orang	46,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	215,250,000
8	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Laporan	19,933,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	47,250,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik		8 Dokumen	8,342,811,000			3,045,170,000	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100%	8,342,811,000			3,045,170,000	
8	01	03	2.01	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	6,695,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	1,695,170,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	975 Orang	595,845,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	750,000,000
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	40 Orang	88,736,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		8 Dokumen	100,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
8	01	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	365 Laporan	963,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8 Dokumen	500,000,000
8	01	4			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina		100%	102,589,000			350,000,000
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		100%	102,589,000			350,000,000
8	01	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Orang	102,589,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	350,000,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100%	255,891,000			472,500,000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100%	255,891,000			472,500,000	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	125 Orang	255,891,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	472,500,000	
8	01	6			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial		100%	572,383,176			819,000,000	
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100%	572,383,176			819,000,000	
8	01	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang	Kab. Musi Banyuasin, Semua	200 Orang	125,499,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	100 %	173,250,000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja
					Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kecamatan, Semua Kelurahan					
8	01	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	50 Orang	181,899,974	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 % 210,000,000
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Laporan	227,983,239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 % 262,500,000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
						Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	37,000,015	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		100 %	173,250,000
							TOTAL		16,374,279,612			13,971,532,000	

BAB. IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana program dan kegiatan dalam dokumen rancangan akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 berdasarkan hasil input pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dapat diakses melalui alamat : (musibanyuasinkab.sipd.kemendagri.go.id). Adapun hasil akhir dari Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRA MAJU 2024
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																
8	01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK											16,374,279,612		13,971,532,000			
8	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											6,845,608,436		8,497,362,000		
8	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											63,775,000		51,000,000	
8	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	38,935,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	25,500,000
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	24,840,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	25,500,000
8	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											4,762,604,826		5,500,000,000	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan PD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	37 Orang/bln	00 %	4,762,604,826	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	5,500,000,000
8	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											28,136,000		50,000,000	
8	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	100 %	28,136,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	50,000,000
8	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											91,625,000		105,000,000	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	2 Paket	100 %	41,625,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian PD	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	8 Orang	100 %	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	55,000,000
8 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								876,409,060					738,000,000
8 01 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	18 Paket	100 %	25,007,190	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	30,000,000
8 01 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	157,876,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	50,000,000
8 01 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	31 Paket	100 %	47,822,270	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	32,000,000
8 01 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	59 Paket	100 %	160,182,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	165,000,000
8 01 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	10 Paket	100 %	49,999,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	52,500,000
8 01 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	100 %	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	31,500,000
8 01 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	14 Laporan	100 %	20,804,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	17,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan KonsultasiSKPD	Persentase Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Laporan	100 %	384,717,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	360,000,000
8 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							183,351,500		666,500,000				
8 01 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Badan Kesbangpol	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	62 Unit	100 %	183,351,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	150,000,000
8 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							401,504,300		647,862,000				
8 01 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	132,904,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	137,862,000
8 01 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang urusan Kantor	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	268,600,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	510,000,000
8 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							438,202,750		739,000,000				
8 01 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Perizinannya	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	4 Unit	100 %	226,011,750	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	185,000,000
8 01 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	100 %	199,991,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	500,000,000
8 01 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	100 %	20 Unit	100 %	12,200,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Layanan Administrasi dan Perkantoran	100 %	24,000,000
8 01 02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN							254,997,000		787,500,000				
8 01 02 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pematapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							254,997,000		787,500,000				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 02 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	215 Orang	100 %	188,312,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	100 %	525,000,000
8 01 02 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	70 Orang	100 %	46,752,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	100 %	215,250,000
8 01 02 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Laporan	100 %	19,933,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase kecamatan yang mendapatkan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa	100 %	47,250,000
8 01 03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK								8,342,811,000					3,045,170,000
8 01 03 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik								8,342,811,000					3,045,170,000
8 01 03 2.01 01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	1 Dokumen	100 %	6,695,170,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	8 Dokumen	1,695,170,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Situasi Politik di Daerah		Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik										
8	01 03 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Musi Banyuasin, Sekayu, Semua Kelurahan	8 Dokumen	975 Orang	100 %	595,845,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	8 Dokumen	750,000,000
8	01 03 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	40 Orang	100 %	88,736,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	8 Dokumen	100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target		
8 01 03 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	8 Dokumen	365 Laporan	100 %	963,060,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Tersedianya dokumen laporan analisa stabilitas politik	8 Dokumen	500,000,000	
8 01 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							102,589,000						350,000,000	
8 01 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							102,589,000							350,000,000
8 01 04 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 %	102,589,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Organisasi Masyarakat yang dibina	100 %	350,000,000	
8 01 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA							255,891,000						472,500,000	
8 01 05 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							255,891,000							472,500,000
8 01 05 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Orang	100 %	255,891,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100 %	472,500,000	
8 01 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL							572,383,176							819,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
8 01 06 2.01	Perumusan Kebijakan	Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial												
8 01 06 2.01 03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Orang	100 %	125,499,948	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	100 %	173,250,000
8 01 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	50 Orang	100 %	181,899,974	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	100 %	210,000,000
8 01 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kab. Musi Banyuasin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	3 Laporan	100 %	227,983,239	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase capaian rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial	100 %	262,500,000
8 01 06 2.01 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi	Persentase capaian rencana aksi terpadu	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi	Persentase Terlaksananya Perumusan	Kab. Musi Banyuasin, Semua	100 %	2 Dokumen	100 %	37,000,015	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Persentase capaian rencana aksi terpadu	100 %	173,250,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
	Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	penanganan konflik sosial	Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Kecamatan, Semua Kelurahan					(PAD)		penanganan konflik sosial		
TOTAL									16,374,279,612					13,971,532,000

BAB. V

PENUTUP

a. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja.

Rancangan awal Dokumen Perencanaan (DOKREN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan teknis tahunan bagi Perangkat Daerah yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek. Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Rancangan awal Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Perencanaan (DOKREN) 2023-2026, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Sub Bagian dan Seksi;
- 2) Dalam rangka implementasi Program dan Kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa, tidak terlepas dari kerja sama lintas sektor. Perlu membangun dan mengintegrasikan berbagai pemikiran yang melibatkan Jajaran Forpimda maupun Forpimcam;
- 3) Peran aktif Forum-forum dan Tim yang dinaungi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terus dibina secara selaras dan terpadu;
- 4) Perlunya berbagai inovasi dan kreasi yang terus dibangun yang sinergis baik tingkat regional maupun nasional;
- 5) Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena aturan dan tata cara penyusunan Renja masih belum sepenuhnya dipahami.

c. Rencana Tindak lanjut.

Guna mendukung Program dan Kegiatan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2023, maka perlu pelibatan berbagai Jajaran lintas sektor, seperti Forpimda, pengurus parpol, pengurus forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Tim Terpadu Penanganan Konflik, Aparatur Pemerintah, Ormas / LSM, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Oleh karena itu guna menyelaskan dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2023 – 2026, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Peran aktif Jajaran Forum Pimpinan Daerah maupun Forum-forum yang berbasis Wawasan Kebangsaan, aparatur Pemerintah, pengurus partai, tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam menciptakan situasi dan kondisi daerah yang aman, tertib, nyaman dan terkendali.
- b. Optimalisasi Program dan kegiatan di bidang Kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik secara terintegrasi baik tingkat regional maupun nasional.

Yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik secara efektif dan berkelanjutan.

Sekayu, 18 Juli 2022

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Musi Banyuasin,



JONNI MARTOHONAN, AP., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19731109 199311 1 001